

**REFORMULASI KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
DALAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

M. SAEDI

NIM. 02040421023

PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Saedi

Nim : 02040421023

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Juli 2023

Saya yang menyatakan,

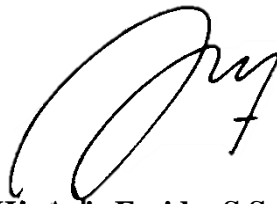


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Reformulasi Kewenangan Lembaga Negara dalam Penguatan Ideologi Pancasila” yang ditulis oleh M. Saedi ini telah disetujui pada tanggal 16 Juni 2023.

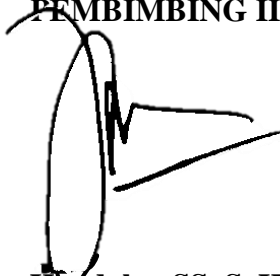
Oleh

PEMBIMBING I



Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos, S. H., M. Si
NIP. 197208062014112001

PEMBIMBING II



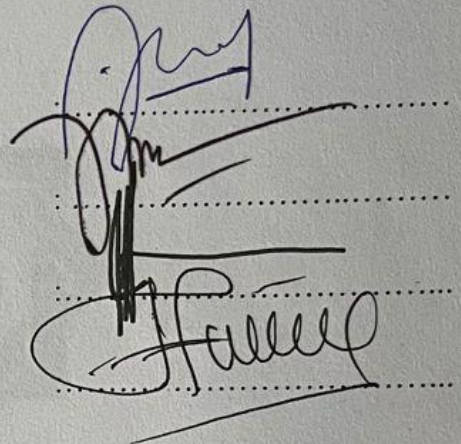
Dr. Priyo Handoko, SS, S. H., M. Hum
NIP. 196602122007011040

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis berjudul “Reformulasi Kewenangan Lembaga Negara dalam Penguatan Ideologi Pancasila” yang ditulis oleh M. Saedi ini telah diuji dalam Ujian Tesis Pada tanggal 14 Juli 2023.

Tim Penguji:

1. Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si.
2. Dr. Priyo Handoko, SS, S. H., M. Hum
3. Dr. Muwahid, S.H., M.Hum
4. Dr. Achmad Fageh, M.HI



Surabaya, 14 Juli 2023.



Prof. Dr. Masdar Hilmy, M.Ag. Ph.D
NIP. 197103021996031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. SAEDI
NIM : 02040421023
Fakultas/Jurusan : MAGISTER HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : diego97pitaloka@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

REFORMULASI KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DALAM PENGUATAN
IDEOLOGI PANCASILA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

()
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Tesis yang berjudul Reformulasi Kewenangan Lembaga Negara dalam Penguatan Ideologi Pancasila adalah penelitian untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah reformulasi kewenangan lembaga dalam penguatan ideologi Pancasila dan penataan system kelembagaan dalam penguatan ideologi Pancasila.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang akan menilik adanya lembaga Negara yang perlu direformulasi lembaga tersebut seperti BPIP, Lemhannas, Direktorat Bina Ideologi dan lembaga yang lain. Adapun pendekatan yang kami pakai yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan pengkajian dari aspek keberadaan lembaga Negara baru dalam hal ini BPIP yang secara eksistensi tugas dan fungsinya terdapat kesamaan dengan lembaga Negara yang telah ada sebelumnya yakni Lembaga Ketahanan Nasional dan Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Hal tersebutlah yang kemudian memberikan kesan adanya kegemukan organ kelembagaan yang pada hakikatnya tugas dan fungsi penguatan ideologi Pancasila tersebut cukup diberikan pada satu lembaga Negara saja. Oleh sebab itu, dalam rangka menghilangkan kesan kegemukan organ kelembagaan dan membangun idealitas eksistensi kelembagaan perlu dilakukan penataan kelembagaan dalam rangka untuk dapat memaksimalkan eksistensi, peran dan fungsi kelembagaan Negara yang sudah ada.

Rekomendasi dari penelitian ini yaitu memberikan tugas dan fungsi penguatan ideologi Pancasila ke satu lembaga Negara saja, dalam hal ini peneliti merekomendasikan untuk memberikan tugas dan fungsi tersebut kepada Lemhannas dengan cara melakukan alih fungsi dan tugas dari BPIP kepada Lemhannas.

Kata Kunci : Reformulasi Kewenangan, Lembaga Negara, Ideologi Pancasila

ABSTRACT

The thesis entitled Reformulation of the Authority of State Institutions in Strengthening Pancasila Ideology is research to answer questions from the formulation of the problem of reformulation of institutional authority in strengthening Pancasila ideology and structuring institutional systems in strengthening Pancasila ideology.

This research uses the type of normative legal research, which will examine the existence of state institutions that need reformulation of these institutions such as BPIP, Lemhannas, Directorate of Ideology Development and other institutions. The approaches we use are the statutory approach, the historical approach and the conceptual approach.

The results of this study indicate that after conducting an assessment of the aspects of the existence of a new state institution, in this case the BPIP, whose duties and functions exist in common with the existing state institutions, namely the National Defense Institute and the Directorate of Ideology and National Insight. It is this which then gives the impression that there is an obesity of institutional organs which in essence the task and function of strengthening the Pancasila ideology is sufficient to be given to only one State institution. Therefore, in order to eliminate the impression of institutional organ obesity and build the ideality of institutional existence, it is necessary to carry out institutional arrangements in order to be able to maximize the existence, role and function of existing state institutions.

The recommendation from this study is to give the task and function of strengthening Pancasila ideology to only one State institution, in this case the researcher recommends giving the task and function to Lemhannas by transferring the functions and tasks from BPIP to Lemhannas.

Keywords: Authority Reformulation, State Institutions, Pancasila Ideology

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penulisan	6
E. Manfaat Penulisan	7
F. Kerangka Teoritik.....	7
G. Keaslian Penelitian	23
H. Metode Penelitian	25
I. Sistematika Penulisan	29
BAB II LANDASAN TEORI	30
A. Teori Organ Dan Lembaga Negara	30
B. Teori Kewenangan.....	34
C. Teori Konflik Norma	38
BAB III DINAMIKA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DALAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA	44

A. Lembaga Negara Yang Pernah Ada Seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.....	66
B. Lembaga Yang Mempunyai Tugas dan Fungsi Sama Berkaitan Dengan Ideologi Pancasila.....	52
1. Lembaga Ketahanan Nasional	52
2. Direktorat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Di Bawah Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum pada Kementerian Dalam Negeri	59
3. Unit Kerja Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).....	60
BAB IV REKONSTRUKSI PENATAAN KELEMBAGAAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA	66
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Armada Riyanto dkk, *Kerifan Lokal Pancasila: Butir-butir Filsafat Keindonesiaan*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2015).

Ati Harmoni, “*Pendidikan Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional*”, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 23, (Jakarta : Lembaga Ketahanan Nasional, 2015).

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005).

Dedi Mulyadi, *Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila Dalam Dinamika Demokrasi dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: Rfika Aditama, 2014).

Hasan Zulkifli, *Revitalisasi Nilai-Nilai Empat Pilar untuk Pembangunan Karakter Bangsa*, (Jakarta Pusat Pengkajian MPR RI)

Jimly Ashddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2006).

Jimly Asshiddiqie, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).

Juwono Sudarsono dan Alex Dinuth, *Catur Windu Lembaga Ketahanan Nasional 1965–1977*, (Jakarta: PT. Intermasa 1977).

Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018).

Mohammad Sinal, *Pancasila Konsensus Negara Bangsa Indonesia*, (Malang: Madani, 2017).

Ni'matul Huda, “*Hukum Tata Negara Indonesia*”, Jakarta PT Rajagrafindo Persada, 2005).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta. Penerbit Kencana Prenada Media Grup. 2013).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Sudikmo Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, *Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Terbaru Untuk Mahasiswa*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

Yudi Latif, “*Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun untuk Pembudayaan*” (Jakarta : Publisher Mizan 2018).

Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataan Kembali Pasca Amandemen Konsitusi*, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

B. Jurnal/Artikel/ Tesis /Disertasi

Fahrur Rosi, *Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila dalam Model Kepemimpinan di Indonesia, Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, (Vol 1, Nomor 1, 2021).

J.Tjitabudy, “Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Melestarikan Nilai-Nilai Pancasila Di Era Reformasi”, *Jurnal Sasi*, Vol. 16, No. 3, (Maluku, Universitas Pattimura, 2010).

Moh. Haliliyanto, “Pola Hubungan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia”, (Tesis—Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2023).

Mohammad Ikhsan Poeger “*Repositioning Peran Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Sebagai Lembaga Think Tank Pemerintah Menjadi World Class Institution*”, *thesis*, (Jakarta: Departemen Kajian Ketahanan Nasional, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2012).

Nurfaqih Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*, (Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No. 3 2020).

Priyo Handoko dan Anis Farida, *Menghujat Presiden: antara Kebebasan Berpendapat dan Tindakan Hate Speech Perspektif Konsitusi dan Hukum Fiqh*, (Jurnal Indonesia Maju, Vol. 1. No. 1, Agustus 2021).

Sabiq Fajar Rozaq, “Eksistensi Lembaga Kepresidenan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Tesis*, (Madura: Program Studi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2018).

Siti Nurlin, “*Kedudukan Lembaga Negara Ad-Hoc Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, *Tesis*, (Makasar: Program Studi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2013).

Suko Purwanto, “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Ideologi”, *Jurnal Lemhannas RI*, Edisi 23, (Jakarta : Lembaga Ketahanan Nasional, 2015).

Susilowati, “Latar Belakang Pembentukan Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (BP-7) Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1980-1999”, *Tesis*, (Surakarta : Universitas Negeri Surakarta, 2015).

Yudi Widagdo Harimurti, “Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)”, *Disertasi*, (Malang : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila

Ketetapan MPR Nomor: II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (EkaPrasetia Pancakarsa)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI, *Materi Sosialisasi 4 Pilar.*

